

BAB V.....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Karakteristik responden.....	48
1. Kelompok umur	48
2. Jenis Kelamin.....	49
3. Agama.....	49
4. Suku.....	50
5. Pekerjaan.....	51
6. Alamat	52
B. Gambaran pengaruh asumsi negatif rencana pembangunan proyek tambang Galena terhadap solidaritas Masyarakat Lembang Sasak	52
1. Ancaman pencemaran Sungai akibat aktivitas Tambang Galena	53
2. Ancaman bencana alam yang diakibatkan keterlibatan Perusahaan penambangan Galena di sekitar hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).....	68
3. Ancaman pengusuran tanah Adat yang berada di wilayah konsesi tambang.	82
4. Ancaman pengrusakan bahkan hilangnya keberadaan kuburan Leluhur (Liang), Patane, Tongkonan, serta lokasi-lokasi ritual adat yang ada di Lembang Sasak sebagai akibat dari hadirnya aktivitas tambang Galena yang bisa saja terjadi di kemudian hari	98
C. Tingkat solidaritas sosial Masyarakat Lembang Sasak dipengaruhi oleh asumsi negatif rencana pembangunan Tambang Galena	113
1. Kemauan warga untuk membantu warga lainnya	114
2. Derajat keterlibatan warga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi .	116
3. Rasa persaudaraan	117
4. Perasaan saling melindungi	119
BAB VI.....	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN SKRIPSI.....	133
LAMPIRAN KUISIONER PENELITIAN.....	134
LAMPIRAN DATA HASIL SPSS	143

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN	166
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN	183
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	188

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. <i>Schedule</i> tahapan proses penelitian	30
Tabel 4.1 Kejadian penting di Lembang Sasak	41
Tabel 5.1 Klasifikasi kelompok umur responden	48
Tabel 5.2. Pandangan jika terjadi pencemaran pada sungai yang berada dekat dengan wilayah konsesi tambang Galena akan mempengaruhi kehidupan responden	55
Tabel 5.3. Hal yang dilakukan responden penelitian guna membantu sesama yang bergantung hidupnya pada aliran sungai di mana terindikasi terdampak pencemaran sungai	59
Tabel 5.4. Keterlibatan responden penelitian dalam membahas permasalahan isu pencemaran sungai	61
Tabel 5.5. Pandangan responden jika masih terdapat anggota masyarakat Lembang yang tidak mempedulikan masalah indikasi pencemaran sungai akibat aktivitas Tambang	62
Tabel 5.6. Perasaan responden terhadap anggota masyarakat yang tidak peduli.....	63
Tabel 5.7. Pandangan responden penelitian jikalau masih terdapat campur tangan dari pihak luar terkait kemungkinan terjadinya pencemaran sungai akibat aktivitas Tambang Galena.....	65
Tabel 5.8. Pendapat responden penelitian mengenai siapa pihak luar Lembang yang ikut campur tangan memberikan pengaruh	66
Tabel 5.9. Distribusi pendapat responden penelitian hadap pernyataan potensi terjadinya bencana alam dikarenakan keterlibatan manusia (bencana ekologis) di areal yang dekat dengan wilayah konsesi tambang Galena dapat mempengaruhi kehidupan responden	70
Tabel 5.10. Hal yang dilakukan responden penelitian guna menolong sesama yang terdampak bencana alam.....	74
Tabel 5.11. Keterlibatan responden penelitian dalam membahas permasalahan bencana alam yang bisa saja terjadi akibat aktivitas tambang Galena	75
Tabel 5.12. Pandangan responden penelitian jika masih terdapat anggota masyarakat Lembang yang tidak mempedulikan anggota masyarakat lain yang terdampak bencana alam yang bisa saja terjadi di kemudian hari akibat aktivitas tambang Galena.....	76
Tabel 5.13. Perasaan responden penelitian terhadap anggota masyarakat yang tidak peduli dengan masyarakat yang terdampak musibah jika seandainya bencana alam yang diakibatkan aktivitas tambang Galena terjadi di kemudian hari	77
Tabel 5.14. Distribusi responden penelitian berdasarkan sikap saling melindungi bilamana nampak keterlibatan dari pihak luar terhadap masyarakat yang memperlakukan perkara bencana ekologis yang bisa saja terjadi di kemudian hari diakibatkan oleh aktivitas tambang Galena di Lembang Sasak.....	81

Tabel 5.15. Distribusi responden penelitian hadap pernyataan potensi terjadinya penggusuran tanah adat (tanah Tongkonan) di areal yang dekat dengan wilayah konsesi tambang Galena dapat mempengaruhi kehidupannya.....	84
Tabel 5.16. Hal yang dilakukan responden penelitian guna menolong sesama yang terdampak penggusuran tanah adat	88
Tabel 5.17. Pandangan responden penelitian terhadap pernyataan jika masih terdapat anggota masyarakat Lembang yang tidak mempedulikan masalah penggusuran tanah adat (tanah Tongkonan) pun jikalau permasalahan tersebut sudah terjadi	90
Tabel 5.18. Distribusi pandangan responden penelitian jikalau masih terdapat campur tangan dari pihak luar terkait kemungkinan terjadinya penggusuran tanah akibat aktivitas Tambang Galena.....	94
Tabel 5.19. Pendapat responden penelitian mengenai pihak luar Lembang yang ikut campur tangan memberikan pengaruh.....	95
Tabel 5.20. Pendapat responden penelitian jika terjadi pengrusakan bahkan hilangnya peninggalan adat di areal yang dekat dengan wilayah konsesi tambang Galena dapat mempengaruhi kehidupannya.....	100
Tabel 5.21. Keterlibatan responden penelitian dalam membahas permasalahan pengrusakan bahkan hilangnya beberapa peninggalan adat yang bisa saja terjadi akibat aktivitas tambang Galena.....	105
Tabel 5.22. Pendapat dari responden penelitian jika ditanya setujuakah pribadi responden jika masih terdapat anggota masyarakat Lembang yang tidak mempedulikan masyarakat lain yang mengalami musibah akibat dampak pengrusakan bahkan hilangnya beberapa peninggalan adat yang bisa saja terjadi	106
Tabel 5.23. Pendapat responden penelitian mengenai siapa pihak luar Lembang yang ikut campur tangan memberikan pengaruh	111
Tabel 5.24. Distribusi responden penelitian berdasarkan sikap saling melindungi bilamana nampak keterlibatan dari pihak luar terhadap masyarakat yang mempermasalahkan perkara terjadinya pengrusakan bahkan hilangnya keberadaan Kuburan Leluhur, Patane, rumah Tongkonan, serta lokasi-lokasi ritual adat akibat aktivitas tambang Galena yang bisa saja terjadi di kemudian hari.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual Penelitian	25
Gambar 4.1. Tingkat pendidikan penduduk Lembang Sasak	44
Gambar 5.1. Distribusi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin .	49
Gambar 5.2. Distribusi responden penelitian berdasarkan agama	50
Gambar 5.3. Distribusi responden penelitian berdasarkan tipikal pekerjaan	51
Gambar 5.4. Distribusi responden penelitian berdasarkan alamat tempat tinggal.....	52
Gambar 5.5 Alasan yang membuat responden penelitian berpendapat....	56
Gambar 5.6. Distribusi pandangan responden penelitian terhadap keinginan masyarakat untuk mau tergerak guna membantu sesama	58
Gambar 5.7. Distribusi responden penelitian berdasarkan sikap saling melindungi bilamana nampak keterlibatan dari pihak luar terhadap masyarakat yang mempermasalahkan perkara pencemaran sungai yang bisa saja terjadi di kemudian hari akibat aktivitas tambang Galena di Lembang Sasak.....	68
Gambar 5.8. Alasan yang membuat responden penelitian berpendapat...	71
Gambar 5.9. Distribusi pendapat responden penelitian terhadap pernyataan jika nantinya masyarakat mau tergerak untuk membantu sesama yang terdampak bencana	73
Gambar 5.10. Pendapat responden penelitian jikalau masih terdapat campur tangan dari pihak luar terkait kemungkinan terjadinya bencana alam akibat aktivitas Tambang Galena	78
Gambar 5. 11. Pendapat responden penelitian mengenai siapa pihak luar Lembang yang ikut campur tangan memberikan pengaruh	80
Gambar 5.12. Alasan yang membuat responden penelitian berpendapat.	85
Gambar 5. 13. Distribusi pendapat responden penelitian terhadap pernyataan jika nantinya masyarakat mau tergerak untuk membantu sesama yang bergantung hidupnya pada tanah adat (tanah Tongkonan) jikalau penggusuran tanah adat terjadi dikemudian hari karena aktivitas Tambang Galena.....	87
Gambar 5. 14. Distribusi pendapat responden penelitian mengenai keterlibatan dalam membahas permasalahan penggusuran tanah adat (tanah Tongkonan) yang bisa saja terjadi akibat aktivitas tambang Galena	89
Gambar 5. 15. Perasaan responden penelitian terhadap anggota masyarakat yang tidak peduli dengan masyarakat yang terdampak musibah jika seandainya penggusuran tanah adat (tanah Tongkonan) yang diakibatkan aktivitas tambang Galena terjadi di kemudian hari	92
Gambar 5.16. Distribusi pendapat responden penelitian berdasarkan sikap saling melindungi bilamana nampak keterlibatan dari pihak luar terhadap masyarakat yang mempermasalahkan perkara penggusuran tanah adat	

(tanah Tongkonan) yang bisa saja terjadi di kemudian hari yang diakibatkan oleh aktivitas tambang Galena di Lembang Sasak	97
Gambar 5.17. Alasan responden penelitian berpendapat.....	101
Gambar 5.18. Distribusi pandangan responden penelitian terhadap keinginan masyarakat untuk mau tergerak guna membantu sesama	103
Gambar 5.19. Hal yang dilakukan responden penelitian guna menolong sesama yang terdampak terdampak jikalau di kemudian hari pengrusakan bahkan hilangnya peninggalan adat terjadi di daerah responden benar-benar terjadi	104
Gambar 5.20. Perasaan yang timbul pada diri responden penelitian terhadap anggota masyarakat yang tidak peduli dengan masyarakat yang terdampak musibah jika seandainya terjadi pengrusakan bahkan hilangnya beberapa peninggalan adat oleh aktivitas tambang Galena di kemudian hari	108
Gambar 5.21. Pendapat responden penelitian jikalau masih terdapat campur tangan dari pihak luar terkait kemungkinan terjadinya pengrusakan bahkan hilangnya keberadaan Kuburan Leluhur, Patane, rumah Tongkonan, serta lokasi-lokasi ritual adat yang ada di Lembang Sasak	109

DAFTAR LAMPIRAN

Kuisisioner Penelitian.....	134
Data Hasil SPSS	143
Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	166
Permohonan Izin Melakukan Penelitian	184
Izin Penelitian dari Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	185
Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja	186
Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di lokasi Penelitian dari Kantor Lembang Sasak.....	187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari peranan lingkungan di mana mereka hidup. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa kemudian alam lingkungannya merupakan salah satu penunjang kehidupan manusia. Manusia tidak dapat dipungkiri memerlukan unsur-unsur *biotik* (mahkluk hidup) yang lainnya juga tidak dipungkiri membutuhkan sokongan unsur *abiotik* (benda tidak hidup) yang terdapat di alam agar dapat hidup. Sebut saja kebutuhan akan tanah dan tumbuhan yang sedang ramai digumuli. Sebaliknya, alam juga membutuhkan peran dari manusia sebagai mahkluk yang berakal guna menjaga dan mengusahakannya. Namun yang terkadang menjadi permasalahan ketika manusia dalam hal ini lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga memicu munculnya sikap *antroposentrisme* atau paham yang menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah manusia.

Kehidupan Masyarakat Adat di Indonesia merupakan hal yang lantas harusnya menjadi salah satu fokus perhatian utama dalam segi pelaksanaan pembangunan. Data mengenai jumlah Masyarakat Adat saat ini dapat dikata masih beragam pun juga belum terdapat kesepakatan secara pasti berapa total dari jumlah keseluruhan Masyarakat Adat yang hidup di Indonesia. Permasalahan ini terjadi dikarenakan hadirnya beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah definisi yang kemudian digunakan untuk menjurus kepada siapa yang dimaksud Masyarakat Adat. Faktor yang kedua ialah sampai pada hari ini belum dilakukan survei serius guna

menghitung jumlah keseluruhan Masyarakat Adat (anggota) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini bukan berarti data dari jumlah tersebut tidak ada. Adapun yang dimaksud tersebar di, Kementerian dan Lembaga (K/L), instansi-instansi baik pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam buku “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif”, dikatakan bahwa Masyarakat Adat, khususnya kelompok yang masih sangat terpencil, merupakan kelompok yang sangat rentan dalam masyarakat kita dan negara secara umum. Ada dua penyebab mengapa demikian, pertama, tingkat ketergantungan mereka masih sangat tinggi terhadap alam. Adanya perubahan sedikit saja yang terjadi akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Kedua, permasalahan Masyarakat Adat merupakan permasalahan yang relatif tidak dikenal oleh masyarakat luas karena berada di daerah yang jauh, dan hanya daerah tertentu saja yang memiliki permasalahan Masyarakat Adat (Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ 2013).

Pengaruh yang paling signifikan dan secara langsung berdampak pada kehidupan Masyarakat Adat adalah investasi pembukaan hutan untuk keperluan Perkebunan, Tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun sebagai areal transmigrasi. Sebagai contoh di Jambi, areal hutan tempat persebaran Orang Rimba sudah jauh menyusut karena ekspansi pembukaan lahan hutan oleh pihak luar untuk keperluan yang disebutkan di atas. Karena secara tradisional. Masyarakat Adat yang dikategorikan terpencil tersebut hidup praktis hanya menggantungkan hidup

dari alam seperti berburu, bertani, dan mencari ikan di sungai, perubahan ekosistem lingkungan tempat tinggal mereka otomatis berpengaruh terhadap kehidupan Masyarakat Adat tersebut (Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ 2013).

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengeluarkan peraturan hukum melalui hadirnya Perda (Peraturan Daerah) No. 2 tahun 2001 Tentang Pemerintah Lembang, di mana dalam hal ini menentukan struktur pemerintahan juga reorganisasi wilayah, dengan tujuan untuk melakukan pembentukan kembali lembang.

Lembang adalah satuan politik pun administrasi pemerintah yang dalam pengaplikasiannya lebih besar dari desa di masa Orde Baru. Lembang diduga telah ada sebelum masa pemerintahan kolonial Belanda, kemudian sistem pemerintahan Lembang muncul kembali guna menata sturuktur pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja. Lembang dalam hal ini mencakup wilayah geografis dari masyarakat dikarenakan terjalinnya ikatan generasi yang memiliki asal-usul nenek moyang (leluhur) yang sama juga terdapatnya perangkat hukum sosial dan budaya serta nilai-nilai dan bentuk tradisional organisasi pemerintahan.

Kabupaten Tana Toraja pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahannya. Pranata ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu wilayah menjadi satu desa yang disebut Lembang. Lembang sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah

kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, dengan demikian Lembang dapat dikatakan sebagai desa adat di Tana Toraja, di mana pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala Lembang (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala Lembang ini pada umumnya merupakan keturunan suatu Tongkonan yang memiliki pengaruh besar dalam suatu wilayah masyarakat. (Mody, 2016)

Kegiatan pembukaan lahan oleh perusahaan terkadang tidak lepas dari problematika sosial dan lingkungan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. begitupun dengan upaya pembangunan Tambang yang belakangan ini menjadi isu yang hangat di kalangan masyarakat Tana Toraja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tambang merupakan lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya (KBBI, 2023). Mengacu pada pengertian tersebut, kehadiran tambang dalam hal ini membuka peluang untuk kegiatan pertambangan yang di mana merupakan hal yang sifatnya eksploitatif terhadap sumber daya alam yang ada di bawah tanah. Proses kegiatan pendayagunaan (eksploitasi) tanah khususnya Tambang tentunya memerlukan ruang berupa wilayah sebagai tempat pengoperasiannya. Faktor wilayah operasional terkadang menjadi penghalang bagi kegiatan pertambangan mengingat hal tersebut menjadi salah satu faktor penting yang harus dihadirkan terlebih dahulu.

Galena adalah mineral timbal sulfida dengan komposisi kimia PbS. Galena merupakan bijih utama timbal (timah hitam) dan ditambang dari sejumlah besar

deposit di banyak negara. Galena banyak ditemukan dalam batuan beku dan metamorf. Galena merupakan mineral yang sangat penting karena berfungsi sebagai bijih untuk sebagian besar produksi timbal di dunia. Galena juga merupakan bijih yang signifikan dari perak. Kegunaan timbal paling penting saat ini adalah dalam baterai timbal. Sebuah baterai khusus mengandung sekitar 20 pon timbal dan harus diganti setiap empat atau lima tahun (Flysh Geost, 2016).

Baterai timbal juga digunakan sebagai sumber pasokan listrik darurat untuk jaringan komputer, fasilitas komunikasi, dan sistem penting lainnya. Timbal juga merupakan salah satu logam yang digunakan dalam sistem penyimpanan energi yang terkait dengan pembangkit listrik dan kendaraan hybrid.

Dalam kasus kali ini, peneliti melihat adanya ketidak sepakatan antara Masyarakat adat dan perusahaan yang berencana menggunakan lahan adat untuk kepentingan penambangan. Dengan kata lain, kehadiran rencana proyek pembangunan Tambang Galena berindikasi pada penggunaan wilayah adat yang tidak senada dengan kemauan masyarakat di lokasi penelitian.

Dilansir dari klikhijau.com, “.....Konflik masyarakat dengan perusahaan tambang kembali terjadi di Tana Toraja. Meski bukan termasuk kasus baru, pada 4 Februari (2021) lalu masyarakat yang dimotori kelompok pemuda dan mahasiswa melakukan aksi penolakan aktivitas tambang yang berada di dua kecamatan di Tana Toraja. Gerakan penolakan yang dilakukan kelompok masyarakat yang menamakan diri ‘Toraja Tolak Tambang’ berawal dari rencana konsesi tambang dua perusahaan eksplorasi tambang mineral logam yaitu PT. Cristina Explo Mining dan PT. Tator Internasional Industrial di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bittuang dan Kecamatan Masanda. Kedua perusahaan ini memiliki luas wilayah konsesi tambang seluas 4000 hektar dengan pembagian PT. Christina Eksplo Mining (CEM) seluas 3.200 ha untuk tambang jenis Galena DMP dan PT. Tator International Industrial (TII) seluas 1.389 ha untuk tambang jenis logam dasar. Aktivitas eksplorasi tambang ini berlangsung di dataran tinggi diimana sebagian besar wilayahnya berada di kecamatan Bittuang (Azwar Radhif, 2021).”

Bagi aliansi gerakan, lokasi perizinan aktivitas tambang ini berada di wilayah yang bukan diperuntukkan untuk kawasan pertambangan. Meski tertera dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tana Toraja 2011-2030 bahwa kecamatan Bittuang masuk dalam kawasan pertambangan, namun kecamatan Bittuang juga termasuk dalam zona merah rawan bencana longsor dan gempa bumi. Pencemaran sungai yang disebabkan aktivitas tambang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat setempat. Kondisi geografis Tana Toraja yang berada di daerah dataran tinggi menjadikannya sebagai pemasok air utama bagi sungai di sekitarnya termasuk sungai Sa'dan. Sungai Sa'dan memberikan kiriman air yang melimpah bagi beberapa kabupaten di sekitarnya. Ancaman kerusakan hulu sungai dapat membawa dampak besar bagi kualitas air yang mengairi irigasi sawah-sawah warga. Limbah tambang yang mengandung zat kimia mineral logam buangan tambang dapat berakibat buruk bagi kehidupan ekosistem sungai dan masyarakat yang mengonsumsi air dari sungai.

Aliansi tolak tambang juga menganggap aktivitas tambang di sekitar hulu DAS dapat mengakibatkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Analisis ini tak lepas dari potensi bencana di kecamatan Bittuang yang masuk kategori rawan longsor. Selain ancaman bencana ekologis akibat tambang, aliansi gerakan juga menganggap kehadiran perusahaan eksploratif mengancam kehidupan masyarakat yang bermukim di dua kecamatan ini. Ancaman penggusuran tanah adat yang berada di wilayah konsesi tambang dan rusaknya peninggalan budaya setempat menjadi mimpi buruk bagi masyarakat setempat.

Selain kedua perusahaan diatas, Aliansi Gerakan Toraja Tolak Tambang juga menemukan beberapa informasi terkait izin usaha pertambangan yang telah dikantongi beberapa perusahaan tambang di daerah Tana Toraja. Hingga kini Aliansi Toraja Tolak Tambang masih getol berjuang untuk mencabut izin tambang dua perusahaan dan perusaha-perusahaan tambang lainnya yang berniat mengeksplorasi di Tana Toraja. Pada 17 Februari lalu, Aliansi menggelar petisi daring di change.org bagi masyarakat yang ingin bersolidaritas bersama mereka.

Juga dikutip dari kareba-toraja.com, “.....Konsesi PT. CEM dan PT. TII berada di Lembang Sasak, Bau, dan Lembang Sandana, serta sebagian wilayah Kecamatan Masanda. Sementara dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Bittuang merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan longsor dan pusat gempa bumi sehingga sangat keliru jika dijadikan lokasi tambang yang justru meningkatkan risiko bencana ekologis (Arsyad Parende, 2021).”

Bukan hanya itu, kedua perusahaan ini juga mengancam keberadaan kuburan leluhur atau Liang, Patane, Tongkonan, serta lokasi-lokasi ritual adat yang ada di tiga Lembang tersebut. Sehingga pengunjung rasa juga meminta DPRD dan Pemda Tana Toraja segera menerbitkan peraturan daerah pengakuan masyarakat adat demi melindungi adat dan budaya Toraja.

Walaupun kegiatan penambangan yang dilakukan perusahaan hari ini masih terbilang belum massif, namun beberapa masyarakat adat di lokasi penelitian (Lembang Sasak) tetap bersikeras untuk menolak rencana proyek penambangan setelah menimbang konsekuensi-konsekuensi negatif yang dianggap bisa saja hadir di kemudian hari. Adapun penelitian ini lebih memusatkan perhatiannya kepada seberapa besar tingkat solidaritas yang terbentuk sebagai respons atas adanya

asumsi dampak negatif yang timbul akibat rencana pembangunan proyek Tambang Galena.

B. Rumusan Masalah

Seberapa besar tingkat solidaritas penolakan yang terbentuk sebagai respons atas adanya asumsi dampak negatif dari rencana pembangunan proyek Tambang Galena?

C. Tujuan

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat solidaritas penolakan sebagai respons atas adanya asumsi dampak negatif dari rencana pembangunan proyek Tambang Galena.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Asumsi

Asumsi dalam kajian filsafat ilmu merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk konkret atau abstrak. Asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Ia diperlukan sebagai arah atau landasan bagi kegiatan penelitian sebelumnya sesuatu yang diteliti tersebut terbukti kebenarannya. Metode ilmiah (seperti empiris eksperimental) adalah hasil penemuan yang telah diupayakan manusia dalam waktu yang cukup lama. Dasarnya sudah ada pada masa Yunani, dikembangkan oleh sarjana muslim pada masa kejayaan islam dan kemudian dirumuskan langkah- langkahnya lebih terperinci pada masa modern. Metode ilmiah didasarkan pada asumsi- asumsi yang biasanya diterima begitu saja (Utari , 2022).

Asumsi biasanya baru berupa dugaan, perkiraan, prediksi dan ramalan. Dengan kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Asumsi bisa dibuat oleh siapa saja, dan tentang apa saja. Arti asumsi juga bisa dikatakan sebagai suatu dugaan sementara yang dianggap sebagai kebenaran oleh si pembuat asumsi, dan membutuhkan pembuktian agar dugaan tersebut menjadi kebenaran yang mutlak (Utari, 2022).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu asumsi adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

Motif kebutuhan, seseorang akan cenderung untuk memperhatikan rangsangan yang sesuai dengan kebutuhan agar bisa memotivasi dirinya bersikap lebih dewasa dari dirinya.

b. Pengalaman

Pengalaman yang diperoleh seseorang dari suatu peristiwa nyata akan dipakai untuk bekal kepercayaan dirinya dalam mengambil kesimpulan terhadap masalah yang serupa dimasa depan.

c. Pengetahuan

Keinginan memperluas pengetahuan seseorang tentang suatu hal akan mempengaruhi ketertarikannya untuk mencari informasi pendukungnya lewat berbagai sumber media yang terpercaya.

d. Harapan

Harapan seseorang terhadap tambahan informasi berharga tertentu akan membuat membuatnya bersikap lebih selektif lagi dalam bentuk menerima segala macam informasi yang didapatkan kemajuannya dimasa depan. (Utari, 2022)

Adapun Proses asumsi diartikan sebagai jalannya rangsangan yang diterima oleh panca indra kita sehingga terbentuk tanggapan berupa asumsi. Asumsi terbentuk karena adanya rangsangan yang diterima oleh panca indra, kemudian terbentuk sensasi yang cepat dan terwujud suatu perhatian yang berbentuk tanggapan. (Utari, 2022)

2. Konsep Fakta Sosial

Paradigma fakta sosial ambil dari kedua karya Durkheim yang meletakkan landasan paradigma fakta sosial melalui karyanya *The Rules of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897). Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baik maupun tidak yang dapat berlaku dari individu sebagai sebuah paksaan eksternal; atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi individual (Durkheim, 1895/1982: 13). Kutipan tersebut kemudian menjelaskan tentang Durkheim yang dalam hal ini memberikan dua definisi untuk fakta sosial agar sosiologi dibedakan dengan psikologi.

Pertama, fakta sosial adalah pengalaman sebagai sebuah paksaan eksternal dan bukannya dorongan internal; kedua, fakta sosial umum meliputi seluruh masyarakat dan tidak terikat pada individu particular apapun. (Ritzer dan Goodman, 2009: 81)

Durkheim disini berpendapat bahwa fakta sosial tidak dapat direduksi terhadap keberadaan individu, tetapi kemudian mestinya dipelajari sebagai bagian dari realitas mereka. Durkheim menggunakan istilah *sui generis* (Bahasa Latin dari “unik”) untuk menjelaskan bahwa fakta sosial memiliki keunikan karakter yang tidak dapat direduksi menjadi sebatas kesadaran individu. Jikalau fakta sosial dapat kemudian dijelaskan dengan merujuk kepada individu, maka sosiologi akan tereduksi menjadi psikologi. Durkheim juga memberikan beberapa contoh mengenai fakta sosial, termasuk di dalamnya beban moral, aturan legal, dan kesepakatan sosial.

3. Solidaritas Sosial

Secara etimologi, Solidaritas Sosial dipetakan kedalam dua suku kata yaitu “solidaritas” dan “sosial”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata solidaritas adalah sifat (perasaan) solider, sifat atau rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya (Depdiknas, 2008) . Sedangkan kata sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum (Depdiknas, 2008). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa solidaritas diambil dari kata Solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (KBBI, 2023). Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kelompok sosial dapat disimpulkan bahwa solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Wacana solidaritas bersifat kemanusiaan dan mengandung nilai adiluhung (mulia/tinggi), tindakan aneh kalau solidaritas ini merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, memang mudah mengucapkan kata solidaritas tetapi kenyataannya dalam kehidupan manusia sangat jauh sekali. Dalam ajaran islam solidaritas sangat di tekankan karena solidaritas salah satu bagian dari nilai islam yang mengandung nilai kemanusiaan (*humanistic*) (Saranga, 2018).

Solidaritas juga merupakan kesetiakawanan antar anggota kelompok sosial. Terdapatnya solidaritas yang tinggi dalam kelompok tergantung pada kepercayaan setiap anggota akan kemampuan anggota lain untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pembagian tugas dalam kelompok sesuai dengan kecakapan masing-masing anggota dengan keadaan tertentu akan memberikan hasil kerja yang baik. Dengan

demikian, akan makin tinggi pula solidaritas kelompok dan makin tinggi pula *sense of belonging* (Huraerah & Purwanto, 2006).

Solidaritas sosial merupakan suatu bentuk hubungan yang erat antara anggota suatu asosiasi, kelompok, kelas sosial, kasta, ataupun antara individu dan kelompok, maupun kelas-kelas yang di mana membentuk masyarakat juga bagian-bagian di dalamnya. Solidaritas merujuk pada hubungan antar individu dan kelompok juga mendasari keterikatan bersama di dalam suatu bentuk kehidupan dengan dukungan nilai-nilai moral ataupun kepercayaan dalam masyarakat.

Solidaritas sosial adalah keadaan saling percaya antar anggota kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya mereka akan menjadi satu atau menjadi sahabat, menjadi saling menghormati, menjadi saling bertanggung jawab untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar sesama (Lawang, 1985:63).

Solidaritas ini menghasilkan persamaan, saling ketergantungan, dan pengalaman yang sama, dan merupakan suatu pengikat unit-unit kolektif seperti keluarga, komunitas, dan kelompok lainnya (Soekanto, 1987:68-69). Durkheim menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas sosial menurut Robbert M.Z Lawang yaitu : “dasar pengertian solidaritas sosial tetap kita berpegang yakni kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul dari tanggung jawab dan kepentingan bersama di antara para anggota” (Lawang, 1985:262).

Solidaritas sosial dapat terjadi karena adanya berbagai macam kesamaan ras, suku dan adanya perasaan yang sama sehingga mereka mempunyai keinginan kuat dalam memperbaiki keadaannya dan daerah ataupun lingkungan sekitarnya agar mereka bisa sedikit memperbaiki keadaan di sekitarnya dengan cara saling membantu satu sama lain terutama dalam hal pembangunan. Solidaritas sosial juga dipengaruhi adanya interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural, yang pada dasarnya disebabkan munculnya sentimen komunitas.(Kusumawati, 2017).

a. Teori Solidaritas Sosial

Emile Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah hasil dari sebuah proses kebersamaan yang disebut sebagai solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan satu keadaan hubungan di antara individu dan individu, individu dan kelompok maupun kelompok,dengan kelompok yang dalam hal ini didasarkan pada perasaan moral ataupun kepercayaan yang dianut bersama di mana diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Adapun perubahan dalam hal pembagian kerja berimplikasi yang sangat besar bagi struktur dalam masyarakat. Emile Durkheim dalam hal ini tertarik dengan proses perubahan yang dalam kasusnya solidaritas sosial terbentuk. Emile Durkheim tertarik dengan proses perubahan yang dalam kasusnya solidaritas sosial terbentuk. Dengan kata lain, perubahan tata cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggota dari masyarakat melihat pribadi mereka sebagai bagian yang sifatnya utuh. Untuk menyikapi hal itu, Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua bentuk solidaritas masyarakat, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.

Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim berawal dari karya yang berjudul *Division of Labor* menyatakan bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah faktor

solidaritas. Perubahan dalam pembagian kerja memiliki implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarakat, Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara di mana solidaritas sosial terbentuk, sehingga perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh.

b. Bentuk Solidaritas Sosial

Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis adalah menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Pandangan Durkheim mengenai masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanik adalah suatu yang hidup. Masyarakat berpikir dan bertindak laku dihadapan kepada gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada di luar individu (Yusuf, 2019). Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sedangkan masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis adalah bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Ritzer dan Goodman, 2010: 90-91).

Durkheim berpendapat bahwa masyarakat dalam masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif lebih kuat yang melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, dia sangat diyakini, sangat rigid, dan isinya sangat bersifat religius, yaitu pemahaman, norma dan kepercayaan bersama. Peningkatan pembagian kerja menyebabkan menyusutnya kesadaran kolektif. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan bersama dengan pembagian kerja dan membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki orang lain daripada bertahan dengan kesadaran kolektif bersama dan kuat. Kesadaran kolektif dibatasi pada sebagian

kelompok, tidak dirasakan terlalu mengikat, kurang rigid, dan isinya adalah kepentingan individu yang lebih tinggi daripada pedoman moral. Oleh karena itu, meskipun masyarakat organis memiliki kesadaran kolektif, namun dia adalah bentuk yang lemah yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan individual (Ritzer dan Goodman, 2010: 92).

Solidaritas mekanik merupakan dasar kohesi sosial, di sana tingkat perorangan sangat rendah, karena setiap individu merupakan satu mikrokosmos yang bersifat kolektif, maka setiap anggota masyarakat semacam ini kesempatan untuk mengembangkan sifat kepribadian khusus sangat terbatas. Artinya bahwa solidaritas ini telah diperkuat oleh disiplin suatu komunitas berdasarkan kebersamaan moral dan sosial. Dalam rangka seperti ini, tradisi sangat berkuasa, individualisme sama sekali tidak ada dan keadilan ditujukan kepada tunduknya individu kepada kehidupan bersama karena solidaritas ini lahir dari kesamaankesamaan yang ada dalam diri anggota masyarakat, ia timbul dari kenyataan bahwa sejumlah keadaan kesadaran dimiliki bersama oleh semua anggota masyarakat itu (Muhni, 1994:33). Dominasi kolektivitas terhadap perorangan terlihat dalam hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang menyimpang dari aturan-aturan atau kode-kode tingkah laku yang ditetapkan oleh kesadaran kolektif. Durkheim lebih lanjut mengkaji perbedaan antara hukum dalam masyarakat solidaritas mekanis yang ditandai oleh masyarakat sederhana dan hukum dalam masyarakat solidaritas organis yang ditandai oleh masyarakat modern. Masyarakat solidaritas mekanis yang ditandai oleh masyarakat sederhana dibentuk oleh hukum represif (menekan), karena anggota masyarakat jenis ini

memiliki kesamaan satu sama lain dan arena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu, karena setiap orang dapat merasakan pelanggaran itu dan sama-sama meyakini moralitas bersama, maka pelanggaran tersebut akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif.

Sedangkan masyarakat solidaritas organik yang ditandai oleh masyarakat modern dibentuk oleh hukum restitutif, di mana seseorang yang melanggar mesti melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Dalam masyarakat seperti ini, pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat dan bukannya terhadap sistem moral itu sendiri, karena kurangnya moral bersama kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum (Ritzer dan Goodman, 2010: 93-94).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tentang masyarakat tradisional dengan solidaritas mekanik, maupun masyarakat modern dengan solidaritas organik, mempunyai eksistensi masing-masing yang berhubungan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat-masyarakat tersebut, yaitu yang menyangkut bagian luar diri individu dan mengendalikan individu dalam masyarakat-masyarakat tersebut. Fakta sosial itu terwujud dari tindakan-tindakan individu untuk membentuk masyarakat tersebut, yang turut mengendalikan individu dalam membentuk masyarakat-masyarakat itu melalui eksistensinya masing-masing. Fakta sosial itu pula yang mengikatkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pemberian hukuman atau sanksi dari suatu keadaan yang menyimpang dari apa yang telah diputuskan dan yang ditentukan oleh masyarakat-masyarakat

tersebut. Masyarakat tradisional dengan bentuk solidaritas mekanik memiliki aturan-aturan kolektif yang mengatur bagaimana mereka berperilaku dengan hukum represif. Masyarakat modern dengan bentuk solidaritas organik memiliki peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi restitutif (*restitutive sanctions*). Maka, dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, kelangsungan hidup perorangan maupun kelangsungan hidup masyarakat dalam kesadaran kolektif itu tergantung pada fakta sosial, yang berhubungan langsung dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi tersebut, di mana dengan penerapan dari peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi tersebut terwujud solidaritas-solidaritas sosial, karena masing-masing konsisten dengan apa yang telah diputuskan dan yang ditentukan oleh masyarakat tersebut. Ikatan yang mempersatukan individu pada solidaritas mekanik adalah adanya kesadaran kolektif. Sementara pada solidaritas organis adalah heterogenitas dan individualitas semakin tinggi (Ramadhana, 2020).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1	REZA HADI KURNIAWAN (2017)	GERAKAN PENOLAKAN TAMBANG (Studi Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal di Desa Selok Awar – awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif	Hasil dari penelelitian menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan penolakan masyarakat selok terhadap kegiatan pertambangan ilegal, meliputi struktur kesempatan politik yang menunjukkan adanya berkurangnya keterlibatan pemerintah melalui aparat keamanan terhadap aktivitas pertambangan, kemudian framing yang digunakan

				<p>untuk membingkai isu sehingga masyarakat kemudian sadar bahwa isu tersebut merupakan permasalahan bersama, serta mobilisasi sumber daya menunjukkan adanya faktor determinan yaitu organisasi gerakan, jaringan, sumber daya materil maupun non materil, kapasitas dan jumlah masa yang sangat berpengaruh dalam proses gerakan penolakan yang terjadi.</p>
2	RIDWAN L (2017)	<p>EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH (STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG MARMER DI DESA LUNJEN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu di Kabupaten Enrekang) dari aspek (a) Perlawanan secara kelompok social atau kolektif dalam hal ini demonstrasi sangat berdampak besar pada masyarakat Desa Lunjen (b) Merusak Cagar Budaya seharusnya memperhatikan apalagi generasi mendatang maka setiap orang dapat melakukan upaya pelestarian atas inisiatif sendiri terhadap kehilangan, kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan. (c) Pencemaran Lingkungan PT CV Arung Bungin</p>

				<p>memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Tambang marmer (d) Bahaya Longsor seharusnya pemerintah yang kontra terhadap tambang dan pro kepada masyarakat sebagai perwakilan yang memperhatikan kesenjangan yang terjadi pada lingkungan penambangan bertanggung jawab penuh pada dampak bahaya longsor.</p>
3	<p>FITRAH RAMADHANA A.I (2020)</p>	<p>SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT KOTA (Kasus Penggusuran di Bara-Baraya)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya kasus penggusuran ditengah-tengah masyarakat Bara-Baraya, solidaritas sosial sudah ada. Sejak kasus ini menyentuh masyarakat Bara-Baraya solidaritas sosial yang terdapat di dalamnya juga secara perlahan semakin meningkat, karena intensitas pertemuan antar sesama masyarakat yang semakin sering dilakukan. Bentuk solidaritas yang terdapat dalam masyarakat Bara-Baraya lebih cenderung ke solidaritas mekanis, karena tipe dan sifat masyarakatnya yang masih tradisonal, adanya kesamaan nasib dalam</p>

				kasus penggusuran, besarnya rasa saling percaya dan toleransi antar sesama masyarakat, serta semangat kolektif yang masih terjaga.
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Adapun penulis menemukan studi yang sesuai dengan Solidaritas Masyarakat, penulis dalam hal ini menemukan studi yang relevan pula. Studi yang dilakukan oleh Reza Hadi Kurniawan (2017), dapat ditemukan bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan penolakan masyarakat Selok terhadap kegiatan pertambangan ilegal, meliputi struktur kesempatan politik yang menunjukkan adanya berkurangnya keterlibatan pemerintah melalui aparat keamanan terhadap aktivitas pertambangan, kemudian *framing* yang digunakan untuk membingkai isu sehingga masyarakat kemudian sadar bahwa isu tersebut merupakan permasalahan bersama, serta mobilisasi sumber daya menunjukkan adanya faktor determinan yaitu organisasi gerakan, jaringan, sumber daya materil maupun non materil, kapasitas dan jumlah masa yang sangat berpengaruh dalam proses gerakan penolakan yang terjadi. Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Reza Hadi Kurniawan dan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian yang dilakukan Reza Hadi Kurniawan lebih berfokus untuk menemukan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan penolakan masyarakat Selok terhadap pertambangan ilegal sedangkan penelitian yang peneliti lakukan telah terlebih dahulu mendudukkan asumsi negatif sebagai faktor yang mempengaruhi di dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian Reza Hadi Kurniawan mengangkat kasus gerakan penolakan masyarakat sedangkan

penelitian ini mengangkat kasus solidaritas penolakan yang terbentuk di dalam masyarakat.

Penelitian oleh Fitrah Ramadhana A.I (2020) dalam penelitiannya mengenai solidaritas sosial Masyarakat Kota terhadap kasus penggusuran di Bara-Baraya kemudian menemukan bahwa sebelum adanya kasus penggusuran ditengah-tengah masyarakat Bara-Baraya, solidaritas sosial sudah ada. Sejak kasus ini menyentuh masyarakat Bara-Baraya solidaritas sosial yang terdapat di dalamnya juga secara perlahan semakin meningkat, karena intensitas pertemuan antar sesama masyarakat yang semakin sering dilakukan. Bentuk solidaritas yang terdapat dalam masyarakat Bara-Baraya lebih cenderung ke solidaritas mekanis, karena tipe dan sifat masyarakatnya yang masih tradisonal, adanya kesamaan nasib dalam kasus penggusuran, besarnya rasa saling percaya dan toleransi antar sesama masyarakat, serta semangat kolektif yang masih terjaga. Adapun perbedaan penelitian Fitrah Ramadhana dengan penelitian ini ialah penelitian Fitrah Ramadhana berfokus untuk meneliti bentuk dari solidaritas yang terdapat dalam masyarakat sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada seberapa besar tingkat solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat.

Lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan L (2017) dapat ditemukan hasil penelitian yang dalam hal ini menunjukkan evaluasi Kebijakan Pemerintah menyoal penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan BuntuBatu di Kabupaten Enrekang dari aspek (a) Perlawanan secara kelompok sosial atau kolektif dalam hal ini demonstrasi sangat berdampak besar pada masyarakat Desa Lunjen (b) Merusak Cagar Budaya seharusnya

memperhatikan apalagi generasi mendatang maka setiap orang dapat melakukan upaya pelestarian atas inisiatif sendiri terhadap kehilangan, kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan. (c) Pencemaran Lingkungan PT CV Arung Bungin memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Tambang marmer (d) Bahaya Longsor seharusnya pemerintah yang kontra terhadap tambang dan pro kepada masyarakat sebagai perwakilan yang memperhatikan kesenjangan yang terjadi pada lingkungan penambangan bertanggung jawab penuh pada dampak bahaya longsor. Walaupun sama-sama mengangkat tentang isu penolakan masyarakat terhadap kegiatan penambangan juga mengangkat isu mengenai lingkungan hidup, namun penelitian yang dilakukan oleh Ridwan L lebih berfokus kepada upaya evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah terhadap kegiatan penambangan dari tinjauan beberapa aspek yang telah dipaparkan sebelumnya. Berbeda dengan penelitian ini yang mencoba mendudukan tinjauan atas kehadiran asumsi negatif rencana pembangunan tambang dalam masyarakat dan pengaruh yang ditimbulkannya terhadap tingkat solidaritas Masyarakat.

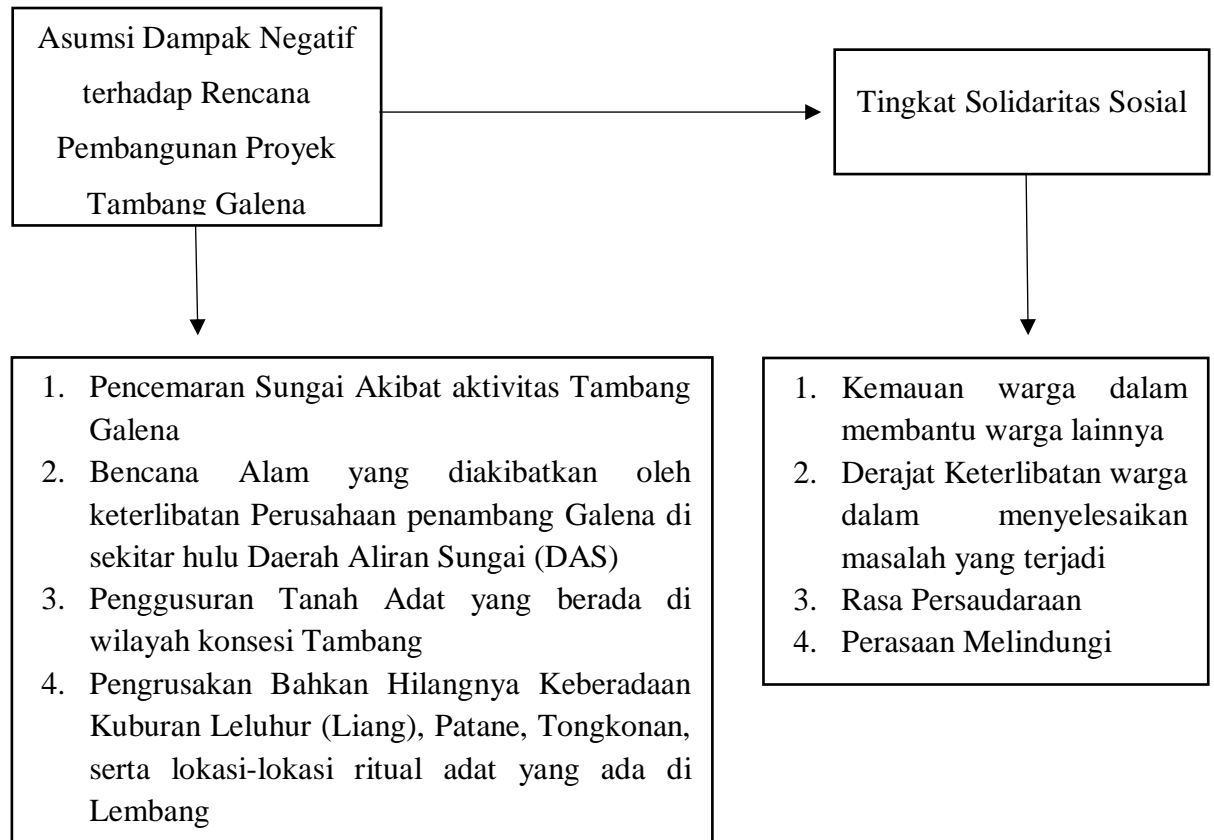
C. Kerangka Konseptual

Kehadiran kerangka konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menciptakan penelitian yang terarah, fokus dan sistematis guna membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Masyarakat di dalam kehidupannya senantiasa melakukan interaksi baik itu antara individu dengan individu, individu dan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Masyarakat adat yang dalam hal ini melakukan penolakan didasari oleh hadirnya beberapa asumsi dampak negatif dari rencana pembangunan proyek Tambang Galena

Proses dilakukannya upaya penolakan terhadap rencana pembangunan proyek tambang menjadi bukti hadirnya Solidaritas Sosial di masyarakat Lembang Sasak. Hal ini tidak dipungkiri menjadi respons atas asumsi negatif mengenai dampak dari pembangunan proyek Tambang Galena yang bisa saja terjadi pun mempengaruhi kehidupan masyarakat yang hidup di Lembang tersebut.

Ancaman pencemaran Sungai akibat aktivitas Tambang Galena, Bencana Alam yang diakibatkan oleh keterlibatan Perusahaan Penambangan Galena di sekitar hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), Penggusuran tanah adat yang berada di konsesi Tambang, dan ancaman pengrusakan bahkan hilangnya keberadaan kuburan Leluhur (Liang), Patane, Tongkonan, serta lokasi-lokasi ritual adat yang ada di Lembang menjadi beberapa asumsi yang dirasa kuat pengaruhnya terhadap tingkat Solidaritas Masyarakat yang mempersoalkan rencana pembangunan proyek Tambang Galena saat ini.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual Penelitian



D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagian yang bertujuan mendefinisikan suatu konsep atau variabel guna dapat diukur dengan melihat pada dimensi indikator yang dimiliki. Adapun definisi operasional yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Asumsi

Asumsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah asumsi negatif yang timbul sebagai respons Masyarakat Adat atas rencana pembangunan proyek Tambang Galena. Asumsi merupakan dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir karena dianggap benar (KBBI, 2023).

2. Solidaritas

Solidaritas sosial merupakan suatu bentuk hubungan yang erat antara anggota suatu asosiasi, kelompok, kelas sosial, kasta, ataupun antara individu dan kelompok, maupun kelas-kelas yang di mana membentuk masyarakat juga bagian-bagian di dalamnya. Solidaritas merujuk pada hubungan antar individu dan kelompok juga mendasari keterikatan bersama di dalam suatu bentuk kehidupan dengan dukungan nilai-nilai moral ataupun kepercayaan dalam masyarakat. Solidaritas ini menghasilkan persamaan, saling ketergantungan, dan pengalaman yang sama, dan merupakan suatu pengikat unit-unit kolektif seperti keluarga, komunitas, dan kelompok lainnya (Soekanto, 1987:68-69). Solidaritas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah solidaritas sosial yang terbentuk pada masyarakat adat Lembang Sasak dalam hal penolakan rencana pembangunan Tambang Galena

3. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat, khususnya kelompok yang masih sangat terpencil, merupakan kelompok yang sangat rentan dalam masyarakat kita dan negara secara umum. Ada dua penyebab mengapa demikian:

- a. Tingkat ketergantungan mereka masih sangat tinggi terhadap alam. Adanya perubahan sedikit saja yang terjadi akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup mereka.
- b. Permasalahan Masyarakat Adat merupakan permasalahan yang relatif tidak dikenal oleh masyarakat luas karena berada di daerah yang jauh, dan hanya daerah tertentu saja yang memiliki permasalahan Masyarakat Adat (Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ 2013). Masyarakat Adat yang diangkat dalam penelitian ini ialah Masyarakat Adat suku Toraja yang mendiami lokasi penelitian (Lembang Sasak).

4. Lembang Sasak

Lembang adalah satuan politik dan administrasi pemerintah yang dalam pengaplikasiannya lebih besar dari desa di masa Orde Baru. Lembang diduga telah ada sebelum masa pemerintahan kolonial Belanda, kemudian sistem pemerintahan Lembang muncul kembali guna menata struktur pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja. Lembang dalam hal ini mencakup wilayah geografis dari masyarakat dikarenakan terjalinnya ikatan generasi yang memiliki asal-usul nenek moyang (leluhur) yang sama juga terdapatnya perangkat hukum sosial dan budaya serta nilai-nilai dan bentuk tradisional organisasi pemerintahan. Pranata ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu wilayah menjadi satu desa yang disebut Lembang. Lembang sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, dengan demikian Lembang dapat dikatakan sebagai desa adat di Tana Toraja, di mana pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala Lembang (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala Lembang ini pada umumnya merupakan keturunan suatu Tongkonan yang memiliki pengaruh besar dalam suatu wilayah masyarakat (Mody, 2016). Lembang Sasak merupakan salah satu desa adat yang berada dalam cakupan 14 wilayah Pemerintahan Lembang-Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Tambang Galena

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tambang merupakan lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (menggambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya (KBBI, 2023). Galena adalah mineral timbal sulfida dengan komposisi kimia PbS. Galena merupakan bijih utama timbal (timah hitam) dan ditambang dari sejumlah besar deposit di banyak negara. Galena banyak ditemukan dalam batuan beku dan metamorf. Galena merupakan mineral yang sangat penting karena berfungsi sebagai bijih untuk sebagian besar produksi timbal di dunia (Flysh Geost, 2016). Tambang Galena yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah Tambang penghasil Galena yang berada di lingkungan Lembang Sasak.